

# Menteri Pigai Usulkan Anggaran Rp20 Triliun untuk Bangun Universitas HAM Bertaraf Internasional

written by Kabar 6 | 23 Oktober 2024



Kabar6 – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya sebesar Rp20 Triliun.

Anggaran sebesar itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan Universitas HAM bertaraf Internasional dan kegiatan edukasi di seluruh desa yang ada di tanah air.

\*\*Baca Juga: [Perdana, Wamenlu Anis Matta Dampingi Prabowo Terima Utusan Khusus UEA dan Mesir di Istana Negara](#)

Namun, usulan itu ditentang mantan Wakil Menteri era Jokowi,

Dino Patti Jalal.

Di akun X atau Twitter miliknya, Dino mengatakan usulan untuk menaikkan anggaran dari Rp60 miliar menjadi Rp 20 Triliun itu sangat tidak masuk akal. Usulan itu tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo.

Menteri Pigi, sapaan karibnya, kemudian menjawab dengan memberikan penjelasan lewat akun X dan ditujukan langsung ke Dino Patti Jalal.

“Pertama, saya mau bangun Universitas HAM bertaraf Internasional terpadu dengan pusat studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika), termasuk Laboratorium HAM, termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dan lain-lain,” ungkap Menteri Pigi, kepada Kabar6.com, Rabu (23/10/2024).

Selanjutnya, kata dia, Universitas HAM dan lainnya tersebut akan dipimpin oleh Putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. Dan, ini icon Indonesia di panggung dunia bahkan satu-satunya di dunia.

Kedua, Menteri Pigi juga akan membangun Kesadaran HAM atau KADARHAM di 78 ribu desa dan masih banyak kegiatan lainnya lagi.

“NB : Pak Dino sebaiknya perlu belajar HAM dan pahami kontek pernyataan saya bahwa saya sih maunya Rp20 T kalau negara sanggup,” ujarnya. (Tim K6)

---

**Anggaran HUT Kabupaten**

# Tangerang Disoal, Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Panitia

written by Kabar 6 | 23 Oktober 2024



[Kabar6](#) – Anggaran perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-392 [Kabupaten Tangerang](#) disoal.

Sejumlah kalangan mempertanyakan sumber anggaran dan penggunaannya selama berlangsungnya rangkaian kegiatan hari jadi daerah berjuluk kota seribu industri ini.

Ketua Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa (KIPANG) Haris mengatakan, pihaknya mendesak panitia HUT Kabupaten agar membuka ke publik terkait sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan.

\*\*Baca Juga: [Sejumlah Pemuda yang Diamankan saat Konser Musik](#)

## [HUT Kabupaten Tangerang Akan Dites Urine](#)

Berdasarkan informasi yang beredar bahwa ada sejumlah perusahaan swasta yang ikut berkontribusi dalam acara perayaan hari jadi [Kabupaten Tangerang](#).

“Publik berhak tahu berapa jumlah anggaran, dari mana sumbernya dan digunakan untuk apa saja. Sebab infonya kegiatan itu juga ada kontribusi dari sejumlah pengembang besar,” ungkap Haris, kepada Kabar6.com, Selasa (15/10/2024).

Menurutnya, sumber anggaran dan alokasinya tentu harus transparan demi terwujudnya asas keterbukaan.

Untuk itu, dirinya meminta Kejaksaan turun memeriksa aliran dana yang masuk ke pihak panitia pelaksana kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini cukup besar, pasti menyedot anggaran yang besar pula, bayangkan untuk bayar artis saja gak sedikit nilainya. Apalagi kegiatan itu dilakukan selama hampir sepekan,” ujarnya.

Terpisah Ketua Panitia HUT ke-392 [Kabupaten Tangerang](#) Hendri Hermawan menjelaskan, pihaknya mengaku bahwa memang ada bantuan dari pihak swasta sebagai sponsor dalam kegiatan itu.

**\*\*Baca Juga: [Beredar Informasi Kasatpol PP Tarik Mundur Anggotanya dari Area Konser Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tangerang](#)**

Namun, pria yang kini menjabat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan [Kabupaten Tangerang](#) ini tak menyebut berapa total nilainya dan dipergunakan untuk apa saja bantuan dari para sponsor tersebut.

“Yang jelas ada bantuan dari para sponsor yang berapa kali disebut di acara,” jelas Hendri melalui pesan singkat WhatsApp yang dikirim ke Kabar6.com, Selasa (15/10/2024), pagi tadi. (Tim K6)

---

# Kata DPRD Kabupaten Serang soal Kunker dan Anggaran Perjalanan Dinas Fiktif

written by Kabar 6 | 23 Oktober 2024



Kabar6- Sebanyak 50 Anggota DPRD Kabupaten Serang periode 2024-2029 sudah resmi dilantik, pada Selasa (3/9)2024) kemarin. Para wakil rakyat itu akan bekerja selama lima tahun ke depan untuk menunaikan janji kampanye kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Serang sementara Bahrul Ulum menuturkan, kunjung kerja anggota DPRD periode 2024-2029 tetap dilakukan sebagai upaya mencari formula pembangunan bagi daerah.

Lagi pula kata Sekretaris DPD Golkar Banten ini Kunker tidak dilarang bagi anggota DPRD. Kecuali melakukan kunker fiktif.

“Bukan di larang melakukan kunjungan kerja. Yang dilarang itu apa bila melakukan kunjungan kerja tapi fiktif, itu yang di larang,” kata Ulum usai pelantikan kemarin.

**\*\*Baca Juga:** [BPK Temukan Perjalanan Dinas Fiktif dan Ganda di Setda Kota Serang](#)

Terkait kunjungan kerja fiktif, anggaran perjalanan dinas di DPRD menjadi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Serang tahun anggaran 2023.

DPRD Kabupaten Serang merealisasikan perjalanan dinas sebesar Rp 27.568.484.568. Kemudian BPK melakukan uji petik atas dokumen pertanggungjawabannya.

Namun biaya transportasi perjalanan dinas sebesar Rp Rp289.579.422 tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dari 11 SPBU yang diuji petik BPK, terdapat struk pembelian BBM yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Pengawas SPBU menyatakan bahwa SPBU yang dikelolanya tidak mengeluarkan jenis setruk seperti yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Ulum mengaku sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Namun ia membantah instansinya melakukan perjalanan dinas fiktif.

Menurutnya, dokumen pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas itu tidak teradministrasi dengan baik. Pasalnya struk pembelian BBM pada perjalanan dinas itu hilang atau tercecer.

“Dalam kontek pemeriksaan, kalau itu tidak bisa dibuktikan itu namanya fiktif padahal orang sudah beli BBM tapi struknya hilang atau tercecer,” tandasnya. (Aep)

---

# Direktur KPN Kritik Kunker Luar Daerah Wakil Rakyat: Gak Prioritas, Hamburkan Anggaran

written by Kabar 6 | 23 Oktober 2024



Kabar6-Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengkritik kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah yang kerap dilakukan oleh anggota DPRD.

Adib menilai jika kunker para wakil rakyat ke luar daerah justru bukan salah satu hal yang prioritas dilakukan.

“Kunker luar daerah itu enggak penting, enggak prioritas hanya cenderung menghambur-hamburkan anggaran. Kalau mau studi banding cukup lewat youtube aja sudah jelas itu, kasih mereka kuota selesai,” kata Adib kepada Kabar6.com, Selasa (3/9/2024).

\*\*Baca Juga: [Airin Intip Potensi Pajak Daerah Ini Jika di Banten Digarap Optimal](#)

Khusus Kabupaten Lebak, ujar Adib, amanah rakyat yang utama wajib diperjuangkan oleh 50 anggota DPRD yang baru dilantik adalah bagaimana Lebak tidak menjadi daerah tertinggal dengan daerah lainnya di Provinsi Banten.

“Kalau kemudian mereka merasa rakyat sudah “dibeli” karena merasa mengeluarkan uang pada saat Pileg kemarin, maka sejatinya mereka itu penghianat demokrasi,” tegas Adib.

Adib bilang, jika perubahan tidak mampu dilakukan oleh para wakil rakyat untuk membawa Lebak lebih baik di berbagai sektor, maka menurutnya para anggota DPRD tersebut menjadi bagian dari oligarki politik.

“Bagian dari kepentingan dinasti politik yang secara tidak langsung membuat masyarakat bodoh,” sebut Adib.

“Mereka akan dicap penghianat ketika lepas dari janji-janjinya, karena seharusnya mereka sudah punya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang baik dan pekerjaan merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar,” jelas Adib. (Nda)

---

## **Raker dengan Komisi III DPR Kejagung Sebut Pagu Anggaran 2023 Terserap 98,24 Persen**

written by Kabar 6 | 23 Oktober 2024



Kabar6-Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono mewakili Jaksa Agung menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), membahas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023.

Dalam kesempatan ini, Wakil Jaksa Agung didampingi Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono dan Jaksa Agung Muda Pengawasan Ali Mukartono atas nama Pimpinan Kejaksaan RI mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Para Anggota Komisi III DPR RI yang terus mendukung, mengawasi serta memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

“Hal itu sebagai bentuk perhatian, concern dan kepedulian terhadap institusi Kejaksaan sebagai mekanisme check and balances dalam sistem ketatanegaraan, yang diharapkan dapat mendorong Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum untuk terus bergerak maju ke arah perkembangan yang lebih baik,” imbuh Jaksa Agung.

**\*\*Baca Juga: [Tak ada Anggaran, Pemkab Pandeglang Potong TPP ASN dan PPPK 45 Persen](#)**

Kemudian, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya hingga tahun 2023 telah berhasil mempertahankan hasil opini dan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 8 kali

berturut-turut.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2023, Kejaksaan RI telah melaksanakan program dukungan manajemen dan program penegakan serta pelayanan hukum.

Pada Tahun Anggaran 2023 Kejaksaan RI mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp16.237.600.348.000 dari jumlah tersebut realisasi serapan anggaran mencapai 98,24% atau sebesar Rp15.952.259.596.131

Selain itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI per tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2023 yakni sebesar Rp4.444.400.167.769 atau secara persentase mencapai 350,97% dari total target Rp1.266.328.676.000

Dari jumlah tersebut, akun realisasi pendapatan terbesar per 31 Desember 2023 adalah Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp2.270.410.043.584 atau secara persentase mencapai 2.607,90% dari total target Rp87.058.791.

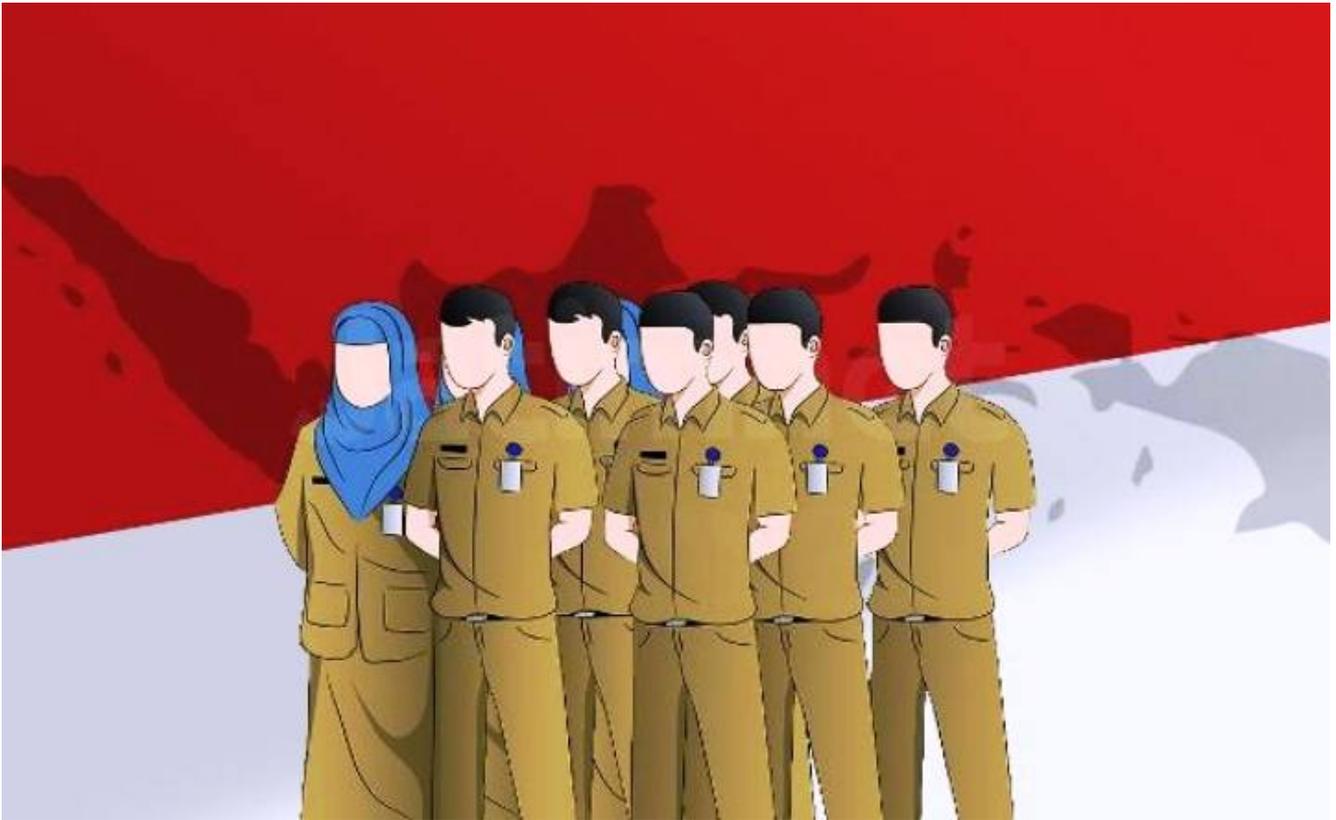
Sebagai informasi tambahan dalam Rapat Kerja ini, Jaksa Agung juga menyampaikan penjelasan terkait Rincian Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan RI Per 19 Agustus 2024, yaitu sebesar Rp12.335.412.718.724 atau secara persentase mencapai 66,20% dari pagu sebesar Rp18.634.776.162.000.

“Sebagai penutup, kami ingin menegaskan kembali komitmen Kejaksaan RI untuk terus menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh integritas dan profesionalisme guna memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik ke depannya,” pungkas Jaksa Agung. (Red)

---

# Tak ada Anggaran, Pemkab Pandeglang Potong TPP ASN dan PPPK 45 Persen

written by Kabar 6 | 23 Oktober 2024



Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengaku terpaksa memotong anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN dan PPPK sebesar 45 persen di tahun 2024.

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku, pemotongan tersebut lantaran kondisi pendapatan asli Daerah (PAD) Pemkab Pandeglang yang minim. Sebab menurutnya, pembayaran TPP sudah tidak bisa lakukan berasal dari bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

“Jadi pertama satu karena kondisi fiskal, lalu dulu masih bisa kotak-katik transfer pusat ternyata di 2023 ada aturan tidak boleh memberikan tunjangan dari transfer pusat harus dari PAD,” kata Irna di pendopo Gubernur Banten, Selasa

(20/8/2024).

**\*\*Baca Juga:** [Bank Indonesia Banten Temukan 1.025 Lembar Uang Palsu Periode Januari hingga Juni 2024](#)

Minimnya PAD Pandeglang berdampak terhadap pemberian TPP ASN dan PPPK. Bupati belum bisa memastikan kapan TPP para pegawainya diberikan normal kembali, terkecuali PAD Pandeglang naik signifikan.

“Sementara PAD kita masih belum signifikan, dari pad kosong sama sekali Ibu buat aturan yang penting tunjungannya ada buat mereka. Dari pada Ibu memberikan Pemberi harapan palsu, ibu sampaikan berkurang 45 persen sampai mapan kembali PAD kita,”ujarnya.

Diakui Irna, penganggaran untuk TPP sebelumnya terlalu besar, tanpa mempertimbangkan potensi PAD. Sebab Pemkab harus mengeluarkan sekitar 16 miliar tiap bulannya hanya untuk TPP saja.

“Karena PPPK nambah terus, tunjangan untuk PPPK bukan dari pusat, tunjangan itu dari PAD setelah dikeluarkan peraturan menteri keuangan 2023. Semuanya bupati dan wali kota keberatan, tolong dong bantuin ke PAD yang belum mapan, jangan disamaratakan,”pungkasnya. (Aep)

---

# **Pemkab Serang Tak ada Anggaran Buat Open Bidding Jabatan Sekda**

written by Kabar 6 | 23 Oktober 2024



Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengaku tidak memiliki anggaran untuk melakukan open bidding jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Jabatan Sekda Kabupaten Serang kosong usai ditinggalkan Nanang Supriyatna. Nanang mundur untuk mendampingi Andika Hazrumy maju di Pilkada Kabupaten Serang 2024.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang, Surtaman mengaku belum memiliki anggaran untuk melakukan open bidding jabatan Sekda.

**\*\*Baca Juga: [Pilgub Banten 2024, Ini Prediksi Bos KPN soal Alasan Golkar Ngotot Usung Airin](#)**

“Tetap gak ada, karena gak ada duitnya,” kata Surtaman, Rabu (14/8/2024).

Kecil kemungkinan open bidding pengganti Nanang bisa dilakukan oleh Bupati Serang yang baru. Terkecuali, pengajuan anggaran open bidding disetujui pada APBD Perubahan.

“Kalau anggaran perubahan di kasih, kita open bidding. Kalau gak nunggu bupati baru,”ungkapannya.

Namun pihaknya tidak bisa menjamin apakah usulan anggaran tersebut disetujui atau tidak.

“Kita mengusulkan anggaran, kalau belum ketuk palu, belum tau

teranggarkan atau tidak. Jadi kami tidak jamin itu di setuju atau tidak,"tuturnya.

Lebih lanjut, Surtaman mengaku hanya memiliki anggaran pada pelaksanaan open bidding pada eselon II di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Keempat OPD tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perikanan, Asisten Daerah (Asda) I dan Direktur RSUD dr Drajat Prawiranegara.

Saat ini Pemkab masih menunggu persetujuan dari Kemendagri untuk melakukan open bidding.

"Kalau untuk OPD itu sekarang proses di perizinan, di awal September ini sudah kita buka open bidding-nya,"pungkasnya. (Aep)

---

## **Tak Punya Anggaran, Layanan Cetak e-KTP di Pandeglang Dihentikan Sementara**

written by Kabar 6 | 23 Oktober 2024



Kabar6-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pandeglang menghentikan sementara layanan cetak e-KTP, lantaran kehabisan tinta ribbon, cleaning kit dan film habis.

Habisnya ketiga item tersebut lantaran tak ada anggaran untuk penyediaan administrasi kependudukan di kabupaten yang di pimpin Irna Narulita itu.

Disdukcapil butuh Rp 1,5 miliar dalam setahun untuk layanan tersebut. Namun hanya 50 persen atau 750 juta yang yang terealisasi. Alhasil penghentian sementara layanan cetak e-KTP sudah sepekan ini.

**\*\*Baca Juga: [86 TKA Baru Masuk Kabupaten Lebak, Disnaker Bidik Potensi Retribusi](#)**

“Anggaran untuk pembelian ketiga item itu di tahun 2024 ini yang seharusnya diterima Rp 1,5 miliar, hanya direalisasikan 750 juta dari Pemkab Pandeglang, makanya jadi hambatan layanan e-KTP,” kata Kasi Administrator Database Kependudukan pada Disdukcapil Pandeglang, Samsudin kepada wartawan, Rabu (14/8/2024).

Samsudin mengaku sudah berusaha berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait stok ke tiga item tersebut, namun hasilnya nihil. Makanya layanan e-KTP belum bisa dilakukan.

“Sejak awal pekan lalu layanan e-KTP ini dihentikan sementara, kemarin kami sudah coba mengajukan ke pihak perusahaan, namun sampai hari ini belum ada realisasi,” katanya.

Samsudin juga menyebut, pihak perusahaan enggan memberikan pinjaman tinta ribbon, cleaning kit dan film tersebut, lantaran Disdukcapil masih memiliki tunggakan ke pihak perusahaan.

“Memang Disdukcapil juga masih punya tunggakan kepada pihak perusahaan, dan pihak perusahaan juga menanyakan untuk jaminannya pinjaman, karena sudah yang ke tiga kalinya kami pinjam,” ujarnya.

Bahkan lanjut Samsudin, jumlah anggaran yang dikurangi tersebut tentu tidak akan mencukupi kebutuhan ketersediaan ribbon, cleaning kit dan film untuk satu tahun kedepan.

Apalagi anggaran sebesar Rp 750 juta itu juga dibayarkan untuk pembelian tinta Ribbon tahun 2023 juga. Karena di tahun 2023 sudah mempunyai hutang kepada pihak penyedia.

“Anggaran yang dikurangi tahun ini tidak cukup memenuhi kebutuhan layanan e-KTP. Terlebih dipake juga untuk pembayaran tunggakan di tahun lalu. Jadi gak bakalan cukup,” keluhnya.

Dijelaskannya, piutang untuk pengadaan tinta ribbon itu dari mulai Bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023 lalu. Meski anggaran tahun lalu untuk pengadaan tinta ribbon dan sebagainya itu full, tapi ada kebijakan lain untuk dialihkan kepada kegiatan fisik, berupa rehabilitasi kantor atau gedung.

“Jadi kami juga belum bisa memastikan kapan pencetakan e-KTP dapat dilakukan, mengingat hingga saat ini belum ada anggaran untuk membeli tinta ribbon, cleaning kit dan film,”

pungkasnya. (Aep)

---

# HMI Pertanyakan Urgensi Rakor Camat Se-Kabupaten Tangerang di Bandung

written by Kabar 6 | 23 Oktober 2024



Kabar6-Rapat koordinasi Camat Se-Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada tanggal 2-3 Agustus di Grand Hotel Preanger, Kota Bandung mendapat kritikan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang Raya.

Mereka menilai Rapat Koordinasi (Rakor) Camat Se-Kabupaten Tangerang yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang bertempat di sebuah hotel yang berada di Kota Bandung merupakan hal yang mubadzir dan buang-buang anggaran.

Sekretaris HMI Cabang Tangerang Raya, Mahardika, mempertanyakan urgensi dari acara tersebut. Padahal hanya sebuah rapat koordinasi tidak perlu jauh ke Bandung dan

menyewa hotel.

\*\*Baca Juga: [Jelang 1 Tahun, HMI Nilai Kinerja Pj Bupati Tangerang Gagal](#)

“Padahal Pemkab Tangerang memiliki aset gedung yang banyak untuk sekedar rapat koordinasi. Kenapa harus sewa hotel ke Bandung. Selain itu, apa hasil dari rapat koordinasi tersebut. Belum ada publikasi kepada masyarakat,” ujar Dika, dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).

HMI Cabang Tangerang Raya menyayangkan agenda rakor camat yang dihadiri oleh Plh Sekda, Asisten Daerah, Kepala Kesbangpol dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan KPU yang dilaksanakan di Bandung ditengah jumlah penduduk miskin Kabupaten Tangerang yang naik 6,93% pada tahun 2024.

“Daripada untuk sewa hotel di Bandung, anggaran tersebut lebih baik dialokasikan pada program pengentasan kemiskinan maupun persoalan lain yang ada di Kabupaten Tangerang. Sekaligus, meminta Pj Bupati dan Plh Sekda selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan di hotel,” tegas Dika. (Oke)

---

**Tahun Anggaran 2025 di  
Tangsel, Belanja  
Infrastruktur Capai 29,49  
Persen**

written by Kabar 6 | 23 Oktober 2024



Kabar6-Peningkatan infrastruktur di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih dapat perhatian khusus. Tahun Anggaran 2025 mendatang belanja infrastruktur dialokasikan sebesar 29,49 persen.

“Sedangkan untuk sektor kesehatan, Pemkot Tangsel mengalokasikan 20,71 persen,” kata Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie usai paripurna KUA-PPAS, Kamis (1/8/2024).

Ia jelaskan, untuk ssektor pendidikan, pada Tahun Anggaran 2025 Pemkot Tangsel mengalokasikan anggaran sebesar 20,25 persen. Sektor kesehatan dialokasikan 20,71 persen.

\*\*Baca Juga: [Kesaksian Inlet Situ Cihuni di Tangerang “Disulap” jadi Jalan dan Ruko](#)

“Alokasi untuk APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan) pengawasan itu sebesar Rp0,63 persen dan alokasi pendidikan dan kompetensi sebesar 0,56 persen,” jelas Benyamin.

Menurutnya, kesepakatan bersama dalam kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara belum sampai detail. Meski demikian ada beberapa prioritas yang disepakati yang menjadi arah pembangunan untuk Tahun Anggaran 2025.

Benyamin menerangkan, terdapat beberapa program yang akan menunjang tercapai visi misi Tangsel Unggul pada 2025. Di antaranya pengembangan SDM, sarana dan prasarana perkotaan, dan mendorong investasi dari sektor perdagangan dan jasa.

“Kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan, itu yang kita sepakati,” tuturnya.

Diketahui, lembaga eksekutif bersama legislatif di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025. Ada enam poin asumsi makro yang dijadikan pertimbangan mendasar.

Berdasarkan hasil pembahasan finalisasi Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 di Kota Tangsel sebesar Rp 4.518.529.672.249,00.(yud)